

**KEWENANGAN DEBT COLLEKTOR DALAM MENAGIH
KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

TESIS



OLEH:

TIMBUL HANOPAN PUTRA

NPM: 2112100016/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT

2025

**KEWENANGAN DEBT COLLEKTOR DALAM MENAGIH
KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Program Studi Magister Hukum Pada
Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu**

OLEH:

TIMBUL HANOPAN PUTRA

NPM: 2112100016/HK

Konsentrasi : Hukum Perdata

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAU PRAPAT

2025

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : KEWENANGAN DEBT COLLEKTOR DALAM MENAGIH
KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU - XVII/2019

Nama Mahasiswa : Timbul Hanopan Putra

NomorInduk : 2112100016

Program Studi : Magister Hukum

Mnyetujui :

Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama

(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, MH)
NIDN.0108088803

Pembimbing Kedua

(Dr. Mohammad Yusuf Siregar, S.H, MH)
NIDN.0114038801

Ketua Program Magister Hukum

(Dr. Mohammad Yusuf Siregar, S.H., M.H)
NIDN.0114038801

Direktur

(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, MH)
NIDN.0108088803

Tanggal Lulus:

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Timbul Hanopan Putra
NPM : 2112100016
Judul : Kewenangan Debtcollector Dalam Menagih Kendaraan yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

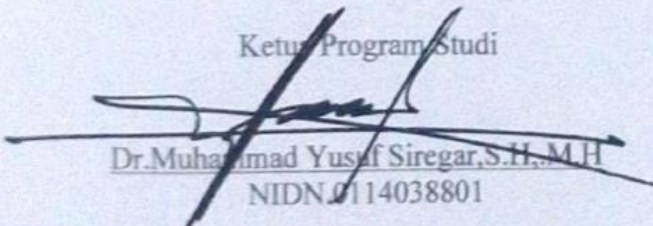
Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H)

Pada tanggal 23 September 2025

PENGUJI

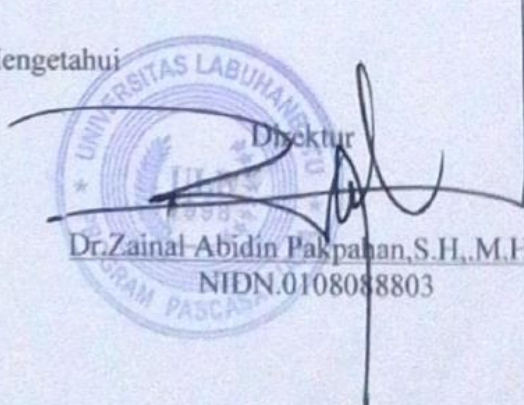
- | | | |
|--|-----------------|---------|
| 1. Dr.Zainal Abidin Pakpahan,S.H.,M.H | Ketua Penguji | 1. |
| 2. Dr.Muhammad Yusuf Siregar,S.H.,M.H. | Anggota Penguji | 2. |
| 3. Assoc.Prof.Dr.H.Sriono,S.H.,M.Kn. | Anggota Penguji | 3. |
| 4. Assoc.Prof.Dr.Lelisari,S.H.,M.H | Anggota Penguji | 4. |

Ketua Program Studi


Dr.Muhammad Yusuf Siregar,S.H.,M.H
NIDN.0114038801

Mengetahui

Direktur


Dr.Zainal Abidin Pakpahan,S.H.,M.H
NIDN.0108088803

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Etnel Manapa Putra

Nomor Induk : 2312100014

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **Kawenangan Debtor-Collector Dalam Menagih Kewajiban Yang Tidak Membayar Porsi Pembiayaan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019** bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan hal tersebut atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penjiplakan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman tersebut.

Kartasurabaya 23 September 2023

Yang Menyatakan



Etnel Manapa Putra

ABSTRAK

Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 2. Faktor kendala yang dihadapi *Debt Collector* dalam penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.3. Mekanisme penyelesaian Penarikan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan secara tepat, akurat, dan sistematis atas sengketa wanprestasi antara debitur dan kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tema Permasalahan yang dibahas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan makna atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999. Segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait.. Faktor lainnya yaitu adanya sikap Penolakan terhadap Hasil Putusan sidang Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan, Dimana debitur belum sepenuhnya menerima putusan tersebut untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur atas pelunasan hutang pembiayaan oleh debitur sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Mekanisme Penyelesaian Penarikan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia dilakukan melalui proses Pengadilan Negeri Dimana proses eksekusi objek jaminan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri, dengan adanya Putusan terhadap eksekusi objek jaminan tersebut oleh juru sita Pengadilan Negeri, maka debitur secara sukarela harus menyerahkan objek jaminan tersebut kepada pihak kreditur. Dengan tetap melakukan kewajiban dalam membayarkan sisa hutang pembiayaan kepada kreditur. *Debt Collector* tidak lagi dapat melakukan penarikan secara paksa dan sewenang-wenang apa yang menjadi objek jaminan fidusia. Tindakan penarikan secara paksa akan menimbulkan dampak hukum pidana berkaitan dengan Perampasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Adapun pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan oleh kreditur yang mana debitur sebagai pemberi fidusia dalam keadaan cidera janji (wanprestasi), serta debitur dalam perjanjian menyatakan bersedia sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak kreditur.

Kata Kunci: *Kewenangan, Debt Collector, Kendaraan Yang Tidak Membayar, Perjanjian, Wanprestasi.*

ABSTRACT

The Authority of *Debt Collectors* in Collecting Vehicles That Have Not Paid After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. 2. The constraints faced by *Debt Collectors* in implementing the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. 3. The mechanism for resolving the Withdrawal of Motor Vehicles After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The research used in this study is a normative legal research method with an analytical descriptive research nature. The normative juridical approach is aimed at describing and explaining precisely, accurately, and systematically the default dispute between debtors and creditors in the Motor Vehicle Financing Agreement, which is connected with legal theories related to the problems and provisions of applicable laws, in accordance with the theme of the Problems discussed. Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has given meaning to Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law No. 42 of 1999. All legal mechanisms and procedures in the implementation of the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must be carried out and apply the same as the implementation of the execution of a court decision that has permanent legal force, in the event that there is a court decision related to the object of the derivative agreement and the main agreement, then the execution of the fiduciary guarantee object, refers to the relevant court decision. Another factor is the attitude of Rejection of the Results of the District Court's Decision in the implementation of the execution of the guarantee object, where the debtor has not fully accepted the decision to voluntarily hand over the fiduciary guarantee object to the creditor for the repayment of the financing debt by the debtor, thus causing obstacles in the implementation of the execution. Mechanism for Settlement of Motor Vehicle Revocation After Constitutional Court Decision Number 18 of 2019 against the fiduciary guarantee object is carried out through the District Court process. Where the process of executing the guarantee object is submitted to the District Court, with the Decision on the execution of the guarantee object by the District Court bailiff, the debtor must voluntarily hand over the guarantee object to the creditor. By continuing to fulfill their obligations to pay the remaining financing debt to the creditor, *Debt Collectors* can no longer forcibly and arbitrarily seize the fiduciary collateral. Such forced seizure will result in criminal legal consequences related to Confiscation as regulated in Article 368 of the Criminal Code. The execution of the collateral may be carried out by the creditor, where the debtor, as the fiduciary provider, is in default, and the debtor, in the agreement, states that he is willing to voluntarily hand over the fiduciary collateral to the creditor.

Keywords: *Authority, Debt Collector , Unpaid Vehicle, Agreement, Default.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah SWT. Hanya dialah tempat kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun. Atas rahmat-nya dan karunia-hyalah sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Kewenangan Debt Collector Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**. Suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya Shalawat dan salam semoga selalau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW anak Abdullah, dan ibunya Siti Aminah, yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa dan raganya beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat *“Laa Ilaaha Illallahu Muhammadarrasulullah”* di dunia ini. Beliaulah sebagai panutan bagi kita dalam meraungi kehidupan yang fana ini.

Segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajiban jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal bagi semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, penulis meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu didalam penulisan ini dan penulis juga tidak lupa memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan melimpahkan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

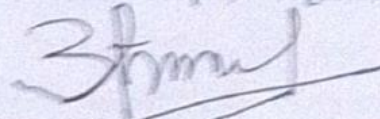
1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Ph. D. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH.I, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
4. Kepada para Pembimbing Pertama Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., dan Pembimbing Kedua Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH.I, M.H., yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin*.
6. Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua penulis ayahanda tercinta Rudy Polder Harahap dan Ibunda Tercinta Nur Aini Siregar kasih sayangmu tiada biasa Ananda balas,pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai,demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu,maka diujung perkuliahan ini Ananda berharap segala pengorbanan menjadi titik awal untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak,disamping itu merekalah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang,serta berkat do'a dan restu mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai jenjang Magister Hukum tersebut.

7. Kepada istri tercinta Nur Islamiyah Am.Keb.serta anak-anak Penulis Raja Tua Hamonangan Harahap, Almera Shakira Zahra dan Arfaas Parlindungan Harahap yang memberikan perhatian dan cinta kasihnya, sehingga menjadikan sebagai motivasi bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril terkhusus buat Kakak-kakak penulis Arniyawati Polder Harahap, Reni Agustina Harahap dan adik Sjapriyani Polder Harahap, Shi, Veni Oktaviani Putri Spd, Mpd yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyusunan Tesis ini.
9. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimba ilmu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu yang tetap semangat dan Bersama-sama berjuang dalam penyelesaian Tesis dan perkuliahan di Pasca Sarjana Universitas Labuhanbatu.

Akhirlah kalam, sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha dari Allah SWT *Wallahu khairu jaza'*. Dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin*.

Wassalamu'alaikum. W.r.Wb.

Rantau Prapat, Agustus 2025



RIMBUL HANOPAN PUTRA, SH
2112100016

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Keaslian Penulisan	26
F. Kerangka Teori dan Konsep	26
1. Kerangka Teori.....	26
2. Kerangka Konsepsi	46
G. Metodologi Penelitian.....	52
1. Jenis dan Sifat Penelitian	52
2. Sumber Data Penelitian.....	53
3. Teknik pengumpulan data	54
4. Analisis data	54
H. Jadwal Penelitian	55
BAB II KEWENANGAN <i>DEBT COLLECTOR</i> DALAM MENAGIH KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18 / PUU – XVII / 2019	57
A. Pengaturan Penarikan Kendaraan Dan Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jaminan Fidusia	57
1. Ketentuan Penagihan melalui <i>Debt Collector</i>	59
2. Sifat Jaminan Fidusia.....	60
3. Eksekusi Jaminan Fidusia.	62
B. Kewenangan Debt Collector Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Oleh Debitur	64

BAB III	FAKTOR KENDALA YANG DIHADAPI DEBT COLLECTOR DALAM PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019	72
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh <i>Debt Collector</i> Akibat Wanprestasi	72
B.	Faktor Kendala Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	78
BAB IV	MEKANISME PENYELESAIAN PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019	85
A.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	85
B.	Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	118
A.	Kesimpulan	118
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		122